

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dewasa ini, perubahan demografi atau kependudukan menjadi salah satu permasalahan yang banyak terjadi di beberapa negara di dunia. Permasalahan demografi ini bukan lagi hanya permasalahan domestik suatu negara saja, namun telah menjadi permasalahan dunia internasional. Perubahan demografi dapat berupa pertumbuhan jumlah penduduk yang meningkat secara cepat (*over population*), penurunan jumlah penduduk (*declining population*) maupun penuaan populasi (*aging population*). Perubahan demografi ini pun dapat mempengaruhi berbagai sektor kehidupan negara seperti dalam bidang ekonomi, sosial, pertahanan, keamanan, kesehatan, dan lain sebagainya. Berdasarkan perkembangan ekonomi dan tingkat fertilitas, negara-negara dapat dikelompokkan menjadi tiga kategori yaitu (1) negara berkembang dengan tingkat fertilitas tinggi seperti Nigeria dan Kongo; (2) negara berkembang dengan penurunan tingkat fertilitas namun tetap dapat melanjutkan pertumbuhan populasi seperti Brazil, Meksiko, Mesir, Tiongkok, India dan Indonesia; dan (3) negara maju dengan tingkat fertilitas berada di ambang batas yang mana memerlukan populasi pengganti seperti Jerman dan Jepang (Nichiporuk, 2000).

Jepang adalah salah satu negara yang unggul dalam bidang ekonomi. Jepang memiliki ekonomi terbesar ketiga di dunia—setelah Amerika Serikat dan Tiongkok—dimana telah mencapai pertumbuhan pesat di paruh kedua abad ke-20 setelah kehancurannya pada Perang Dunia II (BBC, 2017). Menurut data dari tradingeconomics.com, pada September 2017, perekonomian Jepang naik 0,6% dimana memiliki GDP sebesar \$4939,38 miliar (Trading Economics, 2017). Kekuatan utama di balik ekonomi Jepang yang kuat yaitu terletak pada industri manufaktur seperti alat-alat elektronik, mobil, motor,

dan lain sebagainya. Jepang juga dikenal dunia sebagai negara dengan industri teknologi yang sangat maju (Gateway to Japan, 2017). Hal ini tentu saja membuat Jepang memerlukan jumlah sumber daya manusia (SDM) yang melimpah sebagai tenaga kerja dan penggerak perekonomian negara.

Seiring dengan kemajuan perekonomiannya, permasalahan demografi menjadi suatu hambatan bagi perekonomian Jepang di masa mendatang. Permasalahan demografi yang dialami oleh Jepang yaitu berupa *declining population* dan *aging population*. *Declining population* dapat didefinisikan sebagai penurunan jumlah populasi yang dapat disebabkan karena rendahnya angka kelahiran. Angka kelahiran yang rendah dibarengi dengan tingkat mortalitas yang rendah serta angka harapan hidup yang tinggi di Jepang pun menyebabkan rendahnya jumlah angkatan muda jika dibandingkan dengan angkatan tua atau lansia. Fenomena tersebut dapat dinamakan *aging population* atau penuaan populasi. *Aging population* sendiri dapat dimaknai sebagai permasalahan kependudukan dimana jumlah penduduk dengan usia tua lebih banyak daripada penduduk usia muda atau produktif. *Aging population* yang tidak hanya terjadi di Jepang ini memunculkan kekhawatiran yang meluas mengenai adanya kemungkinan efek pada pertumbuhan ekonomi dan kemampuan negara untuk memberikan dukungan bagi penduduk lansia (Banister, Bloom, & Rosenberg, 2010). *Aging population* ini juga mengakibatkan berbagai hal seperti rendahnya jumlah angkatan kerja dan beban negara terhadap penduduk lansia bertambah.

Aging population yang dialami oleh Jepang sudah masuk dalam kategori yang mengkhawatirkan. Pasalnya, laju penuaan populasi yang terjadi di Jepang lebih cepat daripada negara-negara lain di dunia, dengan proporsi orang dewasa yang berusia di atas 65 tahun (23%) tertinggi di dunia, diikuti oleh Italia dan Jerman (20,4%). Jepang juga memiliki rasio anak-anak di bawah 15 tahun (13%) terendah (Takenaka, 2012). Jepang mengalami penurunan kelahiran yang

berkelanjutan sejak tahun 1970-an yang mengakibatkan minimnya jumlah angkatan kerja akibat berkurangnya penduduk dengan usia produktif (Hewitt, 2003). Padahal Jepang yang merupakan negara dengan perekonomian yang cukup tinggi sangat mengandalkan SDM sebagai tenaga kerja dan penggerak perekonomian negara. Suatu negara akan menjadi negara yang kuat ketika memiliki jumlah penduduk dengan kualitas SDM yang tinggi. Ketika yang terjadi sebaliknya, penduduk tersebut hanya akan menjadi beban bagi negara yang bersangkutan. Peningkatan jumlah penduduk dengan disertai tingginya angka harapan hidup mampu menjadikan sebuah negara menuju proses modernisasi (Zhao, 2011).

Proses modernisasi membuat Jepang menjadi negara industri. Industrialisasi ini sejalan dengan kenaikan biaya hidup di suatu negara membuat masyarakat Jepang kini lebih berorientasi untuk bekerja dan memenuhi kebutuhan hidupnya. Masyarakat di negara-negara industri seperti Jepang cenderung menunda untuk menikah karena tuntutan pekerjaan dan biaya hidup yang harus ditanggung cukup tinggi. Ketika akhirnya memutuskan untuk menikah pun, mereka akan cenderung menunda atau bahkan tidak berencana memiliki anak, terutama bagi para wanita karier. Wanita-wanita karier beranggapan bahwa ketika memiliki anak, mereka akan kesulitan untuk bekerja. Terlebih lagi adanya pemahaman bahwa semakin banyak anak akan menjadi beban semata. Hal ini tentu saja menyebabkan tingkat kelahiran di Jepang cukup rendah. Tak hanya itu, distribusi populasi berdasarkan usia akan semakin meningkat dengan kecenderungan tingkat kelahiran yang lebih rendah dan populasi lansia yang lebih besar. Populasi pekerja sudah berkurang baik secara riil maupun proporsional. Jumlah populasi Jepang dengan usia produktif mengalami penurunan yaitu 77,2 juta orang pada tahun 2015 dari 87,2 juta orang pada tahun 1995. Hal ini akan terus menurun menjadi 45,2 juta orang pada tahun 2065 (Kajimoto, 2017). Sebagai hasilnya, ada kekhawatiran atas masalah seperti lambannya pertumbuhan ekonomi dan

meningkatnya beban dukungan bagi segmen masyarakat yang lebih muda dan lebih tua. Seiring dengan bertambahnya usia angkatan kerja, penurunan jumlah pekerja muda dan keseluruhan tenaga kerja dapat diamati (The Japan Institute for Labour Policy and Training, 2016).

Saat ini, situasi tenaga kerja di Jepang kurang baik dimana banyak pekerjaan di berbagai bidang kekurangan tenaga kerja seperti pada sektor pertanian, peternakan, industri manufaktur, dan layanan kesehatan yang mulai ditinggalkan oleh pekerja Jepang. Jumlah tenaga kerja di Jepang sejak tahun 1990 hingga tahun 1998 mengalami peningkatan yang cukup signifikan. Tiap tahunnya, total angkatan kerja di Jepang naik dari 63,872,728 pada tahun 1990 hingga mencapai angka 68,028,984 pada tahun 1998. Setelah itu, total angkatan kerja di Jepang menurun sampai tahun 2004 dan mengalami sedikit peningkatan pada tahun 2007. Namun, sejak tahun 2007 hingga tahun 2012, total angkatan kerja di Jepang mengalami penurunan hingga mencapai angka 65,650,470 pada tahun 2012. Angka ini pun mengalami peningkatan pada tahun 2016 dimana mencapai 66,844,279 dan penurunan lagi di tahun 2017 yaitu pada angka 66,503,545 (The World Bank Data, 2018).

Padahal pada saat yang sama, permintaan akan tenaga kerja meningkat dengan munculnya industri-industri baru di Jepang. Sejak Shinzo Abe menjabat sebagai Perdana Menteri (PM) Jepang pada Desember 2012, Abe gencar membangun kembali perekonomian Jepang yang sempat menurun akibat terjadinya bencana tsunami pada tahun 2011. Pembangunan kembali perekonomian Jepang akibat bencana alam dan juga adanya konstruksi pembangunan untuk *the Tokyo Summer 2020 Olympics* dan *the Tokyo Summer 2020 Paralympics* telah mendorong permintaan akan tenaga kerja di Jepang melonjak sangat tinggi dalam 24 tahun terakhir (Sieg & Miyazaki, 2016). Namun sayangnya, Jepang tidak memiliki jumlah tenaga kerja yang cukup untuk memenuhi permintaan akan tenaga kerjanya yang meningkat.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka rumusan masalah yang muncul yaitu **“Bagaimana upaya pemerintah Jepang dalam memenuhi kebutuhan tenaga kerjanya?”**

C. Tujuan Penelitian

1. Mengetahui dinamika permasalahan demografi yang terjadi di Jepang yang mana menyebabkan *declining population* dan *aging population*.
2. Mengetahui seberapa serius kekurangan tenaga kerja atau krisis tenaga kerja yang terjadi di Jepang.
3. Mengetahui upaya apa saja yang dilakukan oleh pemerintah Jepang untuk memenuhi kebutuhan akan kekurangan tenaga kerja di Jepang.

D. Kerangka Dasar Pemikiran

Untuk mendeskripsikan permasalahan tersebut, penelitian ini membutuhkan konsep yang dapat digunakan sebagai sarana untuk memudahkan penulis dalam memahami permasalahan tersebut. Dalam bukunya yang berjudul Ilmu Hubungan Internasional: Disiplin dan Metodologi, Mohtar Mas'ood mengemukakan bahwa konsep merupakan abstraksi yang mewakili suatu obyek, sifat suatu obyek atau suatu fenomena tertentu. Mohtar Mas'ood menyimpulkan bahwa suatu konsep sebenarnya adalah sebuah kata yang melambangkan suatu gagasan dimana dalam ilmu sosial, konsep menunjuk ada sifat-sifat dari obyek yang dipelajarinya misalnya, orang, kelompok, negara, atau organisasi internasional yang relevan bagi studi tertentu (Mas'ood, 1990).

Untuk menganalisa permasalahan berdasarkan latar belakang masalah dan rumusan masalah diatas, penulis akan menggunakan konsep kerjasama internasional.

1. Konsep Kerjasama Internasional

Kerjasama internasional merupakan salah satu konsep yang banyak dibahas dalam kajian Hubungan Internasional. Dalam kehidupan bermasyarakat, suatu pihak tidak bisa terlepas dari berhubungan dengan pihak lainnya. Begitu juga dengan sebuah negara yang tidak dapat berdiri sendiri dalam memenuhi kebutuhan untuk dapat meningkatkan perkembangan negaranya. Hubungan yang terjalin inilah yang dinamakan interaksi. Interaksi sendiri merupakan suatu hubungan sosial yang dinamis antara orang per orang, maupun antara kelompok manusia dengan orang per orang. Dalam era globalisasi ini, frekuensi interaksi antar negara menjadi lebih tinggi yang mana disebabkan oleh perkembangan teknologi dan ilmu pengetahuan. Interaksi inilah yang membentuk suatu kerjasama dalam berbagai bidang seperti ekonomi, sosial, budaya, politik, pendidikan, ideologi, kesehatan, pertahanan, keamanan, dan lingkungan sosial. Kerjasama antar negara ini dapat meningkatkan hubungan negara-negara di dunia internasional menjadi semakin harmonis. Kerjasama internasional juga harus dilandasi atas dasar prinsip saling percaya, saling menghargai dan menghormati kepentingan masing-masing pihak.

Kalevi Jaakko Holsti dalam bukunya *International Politics, A Framework for Analysis* juga berpendapat bahwa:

“International relations may refer to all forms of interaction between the members of separate societies, whether sponsored by the government or not, the study of international relations would include the analysis of foreign policies or political processes between the nations, however, with its interest in all facts of relations between distinct societies, it would include as well studies or international trade, transportation, communication and the development of international values and ethics.”

(Holsti, International Politics, A Framework for Analysis, 1992)

Dalam bukunya yang berjudul Politik Internasional: Kerangka Untuk Analisis Jilid II yang diterjemahkan oleh M. Tahrir Azhari, K.J. Holsti mendefinisikan kerjasama internasional sebagai berikut (Holsti, Politik Internasional: Kerangka Untuk Analisis, Jilid II, 1988):

- a. Pandangan bahwa dua atau lebih kepentingan, nilai, atau tujuan saling bertemu dan dapat menghasilkan sesuatu, dipromosikan atau dipenuhi oleh semua pihak sekaligus.
- b. Pandangan atau harapan dari suatu negara bahwa kebijakan yang diputuskan oleh negara lainnya akan membantu negara itu untuk mencapai kepentingan dan nilai-nilainya.
- c. Persetujuan atau permasalahan tertentu antara dua negara atau lebih dalam rangka memanfaatkan persamaan kepentingan atau benturan kepentingan.
- d. Aturan resmi atau tidak resmi mengenai transaksi di masa depan yang dilakukan untuk melaksanakan persetujuan.
- e. Transaksi antar negara untuk memenuhi persetujuan mereka.

Menurut K.J. Holsti, kerjasama internasional adalah:

“Sebagian besar transaksi atau interaksi negara dalam sistem internasional sekarang ini bersifat rutin dan hampir bebas dari konflik. Berbagai jenis masalah nasional, regional, dan global bermunculan dan memerlukan pembicaraan mengenai masalah yang dihadapi dan mengemukakan berbagai bukti teknis untuk menyelesaikan permasalahan tertentu, beberapa perjanjian yang memuaskan semua pihak ini disebut dengan

kerjasama.” (Holsti, Politik Internasional: Studi Analisis, 1998)

Kerjasama internasional dapat didefinisikan sebagai usaha yang dilakukan dua negara atau lebih, dengan tidak didasari paksaan untuk mencapai kepentingan dan tujuan yang menguntungkan bagi kedua belah pihak. Hubungan dan kerjasama internasional sendiri muncul karena adanya situasi dan kebutuhan masing-masing pihak atau negara yang berbeda sedangkan potensi yang dimiliki tidak sama. Hal ini lah yang menjadikan proses kerjasama terbentuk karena adanya rasa saling membutuhkan akan kemampuan yang ada di negara lainnya. Kerjasama juga merupakan suatu hal yang sangat biasa dilakukan oleh banyak negara. Sebuah negara tidak dapat bertahan dalam dunia internasional tanpa menjalin kerjasama dengan negara atau pihak lain. Kerjasama diperlukan untuk mempermudah semua pihak dalam mencapai kepentingannya. Kerjasama pun dibuat dengan kesepakatan kedua pihak atau lebih terhadap suatu hal. Saat ini, banyak permasalahan suatu negara atau permasalahan di suatu kawasan yang dapat diatasi dengan menjalin kerjasama dengan negara lain. Kerjasama internasional sendiri terdiri dari berbagai negara dengan kepentingan nasional yang berbeda-beda yang mana tidak dapat dipenuhi di dalam negaranya sendiri. Tolak ukur dari keberhasilan suatu kerjasama internasional yaitu berdasarkan pada sejauh mana keuntungan bersama yang diperoleh melalui kerjasama tersebut.

Dari penjelasan diatas yang berkaitan dengan kerjasama internasional, pemerintah Jepang menjalin kerjasama internasional dengan beberapa negara lain untuk mengatasi permasalahan *aging population*. Permasalahan mengenai *aging population* ini telah menjadi isu internasional yang semakin meresahkan. Di Jepang sendiri, *aging population* mengakibatkan adanya kebutuhan akan tenaga kerja yang semakin meningkat.

Maka dari itu, pemerintah Jepang pun berupaya untuk memenuhi kebutuhan tenaga kerja di Jepang dengan menerima tenaga kerja asing melalui skema *Technical Intern Training Program (TITP)*. TITP ini merupakan suatu program yang mana memberikan pelatihan keterampilan teknis, teknologi dan pengetahuan untuk tenaga kerja asing yang berasal dari negara-negara berkembang. Jepang sendiri melakukan kerjasama dengan beberapa negara seperti Tiongkok, Vietnam, Indonesia, Filipina dan beberapa negara lainnya untuk memenuhi kebutuhannya akan tenaga kerja. Selain melalui skema TITP, pemerintah Jepang pun menjalin kerjasama internasional melalui skema *Economic Partnership Agreement (EPA)* dengan beberapa negara untuk menyalurkan tenaga kerja asing ke Jepang.

Kerjasama antar negara biasanya terjalin dimana masing-masing pihak akan diuntungkan dengan adanya kerjasama tersebut. Pemerintah Jepang pun berupaya menjalin kerjasama dengan negara-negara berkembang tersebut dimana kerjasama tersebut berhubungan dengan transfer tenaga kerja. Jepang yang mengalami kekurangan tenaga kerja akan mendapatkan tenaga kerja asing dari negara-negara berkembang yang menjalin kerjasama dengan Jepang. Kerjasama ini tentu akan sangat menguntungkan kedua negara tersebut dimana Jepang yang kekurangan tenaga kerja akan menerima tenaga kerja asing dari negara-negara tersebut. Di lain sisi, negara-negara berkembang dengan jumlah penduduk yang melimpah yang mana mengirimkan tenaga kerjanya ke Jepang tentu akan memberi kesempatan kerja terhadap penduduknya. Hal ini juga akan menurunkan tingkat pengangguran di negara tersebut.

E. Hipotesa

Dengan mengaitkan pokok permasalahan tersebut dengan kerangka dasar pemikiran di atas, maka hipotesa atas masalah tersebut, yaitu: upaya pemerintah Jepang dalam memenuhi kebutuhan tenaga kerjanya yaitu dengan menjalin kerjasama internasional dengan Indonesia dan Filipina melalui skema *Technical Intern Training Program* (TITP) dan *Economic Partnership Agreement* (EPA).

F. Metodologi Penelitian

1. Pendekatan

Penulisan skripsi ini menggunakan pendekatan kualitatif dimana menggabungkan proses tiga aspek yaitu deskripsi, klasifikasi dan koneksi. Data yang ada akan dideskripsikan sesuai dengan karakteristiknya. Kemudian data yang memiliki karakteristik yang sama akan diklasifikasikan menurut kategorinya masing-masing. Setelah itu, data-data tersebut akan dihubungkan hingga menjadi suatu analisa kualitatif yang dapat mendeskripsikan atau menjelaskan tentang suatu peristiwa secara sistematis, aktual dan akurat (Dey, 1993).

2. Metode Pengumpulan Data

Dalam penulisan skripsi ini, metode pengumpulan data yang digunakan penulis adalah kajian pustaka (*library research*) dimana menelaah sejumlah literatur yang berasal dari sumber sekunder (*secondary sources*). *Secondary sources* ini dapat berupa buku, jurnal, dokumen, artikel, *report* dan makalah. Penulis juga mengumpulkan data dari berbagai berita dan website resmi yang berkaitan dengan isu yang penulis teliti (Kumar, 2011).

3. Metode Analisa Data

Metode analisa data digunakan untuk menginterpretasikan dan mengklarifikasikan data sehingga menjadi suatu argumen yang lebih umum dan saling

terhubung. Metode analisa data ini berupa deskripsi dan eksplanasi dimana berupaya untuk mencari hubungan antara dua aspek atau lebih dalam suatu fenomena. Dicari juga korelasi antara fenomena yang terjadi dengan upaya yang dilakukan untuk merespon fenomena tersebut.

G. Sistematika Penelitian

Sistematika penulisan dalam penelitian ini terdiri dari:

BAB I berisi pendahuluan yang mana memaparkan latar belakang masalah, rumusan masalah, kerangka dasar pemikiran, hipotesa, tujuan penelitian, jangkauan penelitian, metode penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II akan menjelaskan tentang permasalahan demografi di Jepang yang mana berupa *declining population* dan *aging population*. Secara singkat, akan dijelaskan mengenai perkembangan demografi dunia. Selanjutnya, akan dipaparkan mengenai dinamika demografi yang terjadi di Jepang serta situasi masyarakat di Jepang.

BAB III akan memaparkan tentang industrialisasi Jepang dan bagaimana hal ini berpengaruh pada ketersediaan tenaga kerjanya. Akan dibahas juga mengenai kekurangan tenaga kerja yang terjadi di Jepang dan sektor-sektor apa saja yang mengalami kekurangan tenaga kerja.

BAB IV akan menjelaskan secara lebih mendalam mengenai kerjasama internasional Jepang dengan Indonesia dan Filipina melalui skema *Technical Intern Training Program (TITP)* dan *Economic Partnership Agreement (EPA)* untuk memenuhi kebutuhan tenaga kerja di Jepang.

BAB V berisi kesimpulan yang didapat dari BAB I sampai dengan BAB IV. Akan disertakan juga ringkasan singkat sebagai bentuk penegasan atas penelitian ini.